

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PERANGKAT TIYUH
DALAM MENGGERAKKAN KEBIJAKAN KEPALO TIYUH**

**(Studi di Tiuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

RESKI PRATAMA

NPM : 1721020089

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PERANGKAT TIYUH
DALAM MENGERAKKAN KEBIJAKAN KEPALO TIYUH**

**(Studi di Tiuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing 1 : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing 2 : Fathul Mu'in, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp.
(0721) 703260*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reski Pratama
NPM : 1721020089
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepalo Tiyuh (Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan, Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 April 2021
Penyusun

Reski Pratama
NPM. 1721020089

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Tiyuh sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh Perangkat Tiyuh. Perangkat Tiyuh mengemban fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di tiyuh. Dalam pengelolaan keuangan tiyuh, Kepala Tiyuh mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dan dalam pengelolaan keuangan desa hendaklah didasari pada asas-asas yaitu Partisipatif, Tansparan dan Akuntabel. Namun permasalahan di Tiyuh Karta setelah diamati dalam pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi asas-asas salah satunya yaitu transparansi. Suatu desa mempunyai Aparatur Tiyuh yang membantu Kepala Tiyuh yaitu Perangkat Tiyuh yang di mana Perangkat Desa sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan, membantu tugas dan kewajiban Kepala Tiyuh. Dengan adanya Perangkat Desa seharusnya kegiatan pembangunan desa disetarakan untuk semua Rukun Warga (RW). Namun di Tiyuh Karta hanya beberapa Rukun Warga (RW), sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya koodinasi antara Perangkat Tiyuh dengan Kepala Tiyuh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perangkat tiyuh dalam menggerakkan kebijakan kepala tiyuh dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran perangkat tiyuh dalam menggerakkan kebijakan kepala tiyuh. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran perangkat tiyuh dalam menggerakkan kebijakan kepala tiyuh dan untuk mengetahui peran perangkat tiyuh dalam fiqh siyasah. Penelitian menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut.

Peran Perangkat Tiyuh di Tiyuh Karta dalam melaksanakan program Pembangunan Tiyuh belum berperan sepenuhnya, karena kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan dan kurangnya komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Tiyuh Karta karena jarang nya hadir di Kantor Balai Tiyuh dan kurang tertarik dalam melihat potensi yang ada dalam masyarakat dan tiyuh. Pandangan Islam terhadap peran Perangkat Tiyuh dalam hal kepemimpinannya untuk pembangunan tiyuh tidak memenuhi ciri-ciri kepemimpinan, karena Para ketua RW merupakan pemimpin dari organisasinya. Seorang pemimpin harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yaitu (1) Menjalankan amanah; (2) Memutuskan perkara dengan adil; (3) Mencintai Bawahan; (4) Lemah lembut dan bersikap tegas, di tegaskan dalam Al Qur'an Surat Al Anfal ayat 27.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Kebijakan Kepala Tiyuh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat
Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh
(Studi Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang
Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)”**

Nama : **Reski Pratama**
NPM : **1721020089**
Jurusan : **Hukum Tatanegara**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Irwantoni M.Hum.

NIP. 196010199103102.


Fathul Mu'in, M.H.I.

NIP. 198505102020121007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh” (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Disusun oleh Reski Pratama, NPM. 1721020089 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Anfal [8] : 27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

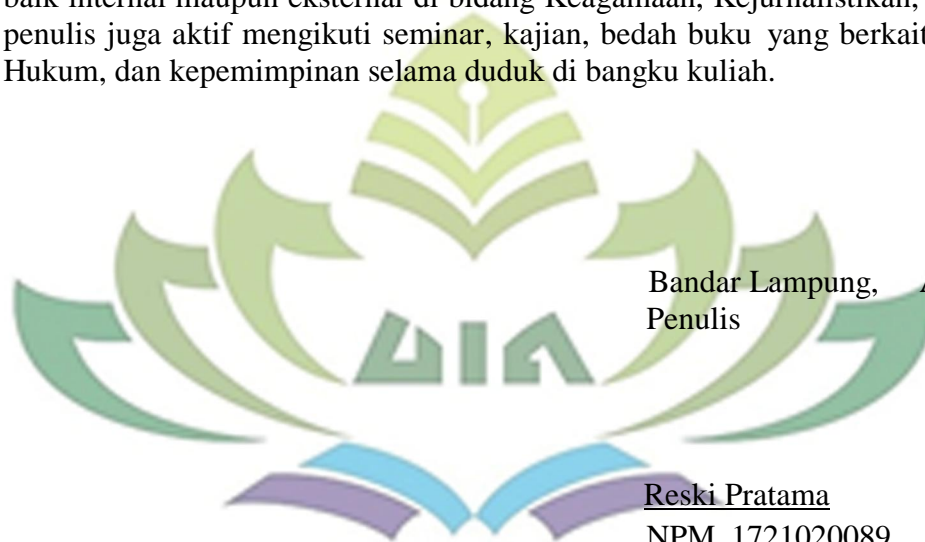
1. Kedua orang tuaku tercinta, Papah Tarzan dan, Mamah Sores Miyati berkat doa restu yang tiada putus-putusnya, dukungan dan suport yang di berikan kepada penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih papah dan mamah.
2. Adik-adikku tercinta, Windia Amanda dan Naira Agledi Ramadani atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. semoga gelar ini bisa menjadi motivasi buat adik-adikku supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Paman dan bibiku walidi Tarmidi, S.H dan masi Evalianty, S.H, M.H berkat bimbingan dan asuhan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, telah mengurus, mendidik, serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
4. Seluruh keluarga besar dari Papahku Usman bin Hasan dan seluruh keluarga besar dari Mamahku Surdin bin Saleh yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa tiada putus-putusnya.

RIWAYAT HIDUP

Reski Pratama dengan nama panggilan Kiki dilahirkan di Karta, 30 Juli 1999. Putra pertama dari buah cinta kasih pasangan bapak Tarzan Bin Usman dengan ibu Sores Miyati Binti Surdin Saleh, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita, Dan diselesaikan pada tahun 2005. Penulis menempuh SDN 2 Karta, dan di selesaikan pada tahun 2011, Pendidikan lanjutan diselesaikan di SMPN 2 Tulang Bawang Udik, di selesaikan tahun 2014. Pendidikan menengah atas di lanjutkan di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah, dan di selesaikan tahun 2017. Pada tahun yang sama 2017 di terima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dengan mengambil Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan keorganisasian baik internal maupun eksternal di bidang Keagamaan, Kejurnalistikan, dan Sosial penulis juga aktif mengikuti seminar, kajian, bedah buku yang berkaitan dengan Hukum, dan kepemimpinan selama duduk di bangku kuliah.



Bandar Lampung, April 2021
Penulis

Reski Pratama
NPM. 1721020089

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kelapa Tiyuh (Studi Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syaria,ah UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Sivitas Akademiq Syaria,ah.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai Islami.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Islam UIN RadenIntan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Prodi HukumTata Negara Fakultas Syaria,ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Fathul Mu'in, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syaria,ah Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syaria,ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10. Seseorang yang masih menjadi rahasia Allah SWT, yang kelak akan mendampingi dalam meraih kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.

Bandar Lampung, Maret 2021

Reski Pratama
NPM.1721020089



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah.....	22
1. Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah	22
2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqh Siyasah	24
3. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqh Siyasah	30
4. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah	32
5. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.....	34
B. Kepemimpinan Tiyuh	38
1. Pengertian Tiyuh	39
2. Peran Dan Tupoksi Perangkat Tiyuh	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tiyuh Karta.....	52
1. Sejarah Tiyuh Karta.....	52
2. Letak Geografis Tiyuh Karta.....	54
3. Keadaan Demografis	55
4. Struktur Pemerintahan Tiyuh Karta	60
5. Visi dan Misi Tiyuh Karta.....	61
B. Tugas dan Fungsi Kepala Tiyuh.....	62
C. Kedudukan dan Peran Perangkat Tiyuh dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh.....	63

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Perangkat Tiyuh	66
E. Program Perangkat Tiyuh dalam Pembangunan Tiyuh Karta.....	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh	69
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Tiyuh Karta Dari Masa Kemasa	54
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Tiyuh Karta.....	55
Tabel 3.3 Sektor Mata Pencarian Masyarakat Tiyuh Karta	56
Tabel 3.4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Tiuh Karta	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Foto Wawancara Dengan Aparatur Tiyuh Karta Dan Masyarakat Karta
- Lampiran 3. Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 4. Surat Izin Riset Kesbangpol Tulang Bawang Barat
- Lampiran 5. Surat Izin Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian judul, karena judul merupakan kerangka beranjaknya tujuan dalam bertindak, terlebih lagi dalam suatu penulisan ilmiah. Adapun judul yang dibahas adalah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh (Studi Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat). Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah sebuah kegiatan penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, pembuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab mashab, duduk perkaranya)¹

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.²

Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam peranannya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.³

¹ Pusat Bahasa Nasional, Indonesia. Departemen Pendidikan, *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² M Sjadzali, *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Penerbit Universitas Indonesia, 1990).

³ Nasional, Indonesia. Departemen Pendidikan, *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 73.

Perangkat Tiyuh/Desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa dan kepala dusun.⁴

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.⁵

Kepalo Tiyuh adalah sebutan pemimpin Kepala desa merupakan orang yang mengepalai desa.⁶

Tiyuh Karta adalah nama Tiyuh (Kampung) yang terdapat di Provinsi Lampung lebih tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁷ Yang mana masyarakat di tiyuh tersebut masih memegang teguh adat istiadat Lampung yang mayoritas merupakan masyarakat pribumi asli Marga Empat Tulang Bawang.

Berdasarkan penegasan judul, maka penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya, melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Mengerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh” (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Kedudukan suci Rasulullah SAW yang pertama ialah kenabian atau kerasulan, yakni kedudukan sebagai pembawa dan penyampai hukum-hukum

⁴ Alwi Hasan dan Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 29.

⁵ Nasional, Indonesia. Departemen Pendidikan, *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 190.

⁶ *Ibid.*, 671.

⁷ Bambang Irawan, “Wawancara Kasi Pemerintahan Tiyuh Karta” (Tulang Bawang Barat: 15 November 2020).

Allah yang diwahyukan kepada-Nya. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan hukum-hukum itu kepada umat manusia. Kedudukan suci kedua adalah sebagai penentu dan pemutus hukum. Dengan demikian, Rasul berkewajiban menegakkan kebenaran bila terjadi pertentangan dan perselisihan di antara manusia dengan berstandar pada satu hukum. Dalam hal ini kedudukan Rasul sebagai seorang hakim yang bisa memutuskan suatu masalah. Kedudukan suci ketiga adalah sebagai penguasa dan pemegang kendali pemerintahan. Rasul adalah pengelola masyarakat dan pemimpin yang menangani berbagai urusan masyarakat.⁸

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandaskan syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.⁹

Uraian di atas timbulah pertanyaan siapakah yang dapat menggantikan Rasul sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Tentu tidak sembarang orang yang dapat menduduki jabatan tersebut, terlebih tugas seorang pemimpin yang begitu berat. Tentunya hanya dapat disandang oleh seseorang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin.

⁸ M Mutahhari, *Islam Dan Tantangan Zaman* (Pustaka Hidayah, 1996), 137.

⁹ I Al-Mawardi dkk., *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016), 3.

Hakikat semua manusia merupakan khalifah Tuhan yang memiliki kesetaraan dalam kekhalifahan ini. Tidak ada pembagian kelompok yang didasarkan pada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua orang mempunyai kedudukan dan status yang sama. Kriteria yang diunggulkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemampuan pribadi dan karakternya, tidak ada seorang pun yang dibedakan hanya karena perbedaan kelahiran, status sosial atau profesinya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahirnya atau merusak perkembangan kepribadiannya.¹⁰

Imam berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.¹¹

Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan dan

¹⁰ S A A Maudoodi, *Hukum dan konstitusi sistem politik Islam* (Penerbit Mizan, 1990), 169.

¹¹ A. Djazuli, "Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah" (2003): 53.

dicita- citakannya. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam.¹²

Agama Islam salah satu yang menjadi dasar umat muslim untuk bermusyawarah menentukan keputusan dalam mencapai mufakat menetapkan peraturan telah terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S Ali Imran (3) ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ هُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Menjadi seorang pemimpin itu merupakan hak setiap Muslim asalkan ia mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Ada beberapa ulama yang merumuskan mengenai syarat kepemimpinan salah satunya adalah al-Mawardi, yaitu seorang ulama dari Madzhab Syafi’i. Dalam kitabnya al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah, beliau menuliskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

Pertama, keseimbangan (al-adâlah) yang memenuhi semua kriteria. Kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Ketiga, pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya, sehingga dapat menangkap dengan benar

¹² Maudoodi, *Hukum dan konstitusi sistem politik Islam*, 170.

dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu. Keempat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima, visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. Ketujuh, mempunyai nasab dari keturunan Quraisy.¹³

Kemudian hal ini juga dituliskan oleh Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam kitab *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.¹⁴ Tentu saja masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat kepemimpinan yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa/tyuh memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat peraturan desa/tyuh disebut dengan (pertiy). Peraturan tyuh adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten/kota membuat peraturan daerah.

Peraturan Tyuh ditetapkan oleh kepala tyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tyuh (BPT). Peraturan tyuh

¹³ Al-Mawardi dkk., *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 6.

¹⁴ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 548.

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tiyuh. Peraturan tiyuh merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat tiyuh.¹⁵

Kepala Tiyuh mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT), menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang tiyuh, menetapkan bendahara tiyuh, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan tiyuh, dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik tiyuh. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Tiyuh dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada perangkat tiyuh yang pengaturannya dilakukan melalui suatu peraturan tiyuh.

Perangkat Tiyuh merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau Kepala Tiyuh dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat tiyuh harus dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan masyarakat. Oleh karena itu perangkat tiyuh dituntut memiliki kemampuan, keterampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Pengelolaan keuangan tiyuh hendaklah didasarkan pada asas-asas.

(1) Partisipatif, mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan tiyuh sedapat mungkin melibatkan partisipasi

¹⁵ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 129.

masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam keuangan tiyuh. (2) Transparan dan Akuntabel, keuangan desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (transparan) dan setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹⁶

Berkaitan dengan kewenangan tiyuh diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan tiyuh, pelaksanaan pembangunan tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.¹⁷

Namun setelah di amati permasalahan di Tiyuh Karta setelah dalam pengelolaan keuangan tiyuh tidak memenuhi asas-asas salah satunya transparan. Suatu tiyuh mempunyai Aparatur Tiyuh yang membantu Kepala Tiyuh yaitu Perangkat Tiyuh yang di mana Perangkat Tiyuh sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan, membantu tugas dan kewajiban Kepala Tiyuh.

Adanya Perangkat Tiyuh seharusnya kegiatan pembangunan tiyuh dapat dilaksanakan untuk semua Rukun Warga (RW), namun di Tiyuh Karta hanya beberapa Rukun Warga (RW) Seperti halnya RW 1,2,3, sampai RW 6, sehingga timbul rasa cemburu sosial dalam masyarakat dengan tidak meratanya pembangunan yang ada di tiyuh karta.

¹⁶ Aries Djaenuri, Siti Aisyah, dan Enceng, *Sistem Pemerintahan Desa* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016), 262.

¹⁷ Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, 126.

C. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat terarah dan untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian. Berdasarkan itu Maka untuk mempermudah dalam melakukan dalam penelitian, peneliti membatasi masalah yaitu untuk menguji “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Perangkat Tiyuh Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh” (Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Kabupaten Tulang Bawang Barat).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Perangkat Tiyuh dalam menggerakkan kebijakan kepala tiyuh?
2. Bagaimana Pandangan fiqh siyasah terhadap peran Perangkat Tiyuh dalam menggerakkan kebijakan Kepala Tiyuh

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Perangkat Tiyuh dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh
2. Untuk mengetahui Peran Perangkat Tiyuh dalam Fiqh Siyasah.

F. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Perangkat Tiyuh dalam

menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh (studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat). Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan secara praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah penulis melakukan penelusuran kajian penelitian terdahulu koleksi Skripsi Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis menemukan penelitian dengan judul yang sama "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)". Namun, setelah melakukan pencarian secara online, penulis juga menemukan penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Adapun penelitian yang relevan dengan judul yang penulis yakni sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Yan Patmawi Sakbar pada tahun 2014 yang berjudul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi

di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)” Jurusan Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung memaparkan bahwa Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang adanya aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, di dalam pemilihan anggota BPD di desa Sumber Jaya tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, namun tidak melanggar aturan perundang-undangan karena aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.¹⁸ Penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa perempuan pada badan perwakilan desa di desa sumber jaya punya keterlibtan yang sama di BPD sedangkan perempuan juga punya hak suara dan keterampilan dan mempunyai peran yang sama di desa untuk memajukan desa. Perbandingannya dengan skripsi ini terletak pada lembaga yang di angkat tetapi sama-sama mengangkat peran

¹⁸ Sakban dan Yan Patmawi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

kebijakan dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Penelitian dilakukan oleh Nabila Puspita, pada tahun 2014 yang berjudul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”, jurusan Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung memaparkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.¹⁹

Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan bpd punya tanggung jawab dan ranah kerjanya masing-masing dalam pembangunan desa, kepala desa punya wewenang sebagai pemimpin di desa, dan bpd sebagai pembuat peraturan di desa. Perbedaannya dengan judul skripsi ini adalah skripsi lebih pada bagaimana terapan dan sosialitas dalam

¹⁹ Nabila Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)” (Desember 7, 2018).

menjalankan amanah sehingga dapat terskruktur sesuai kinerja dan porsinya masing-msing.

3. Penelitian dilakukan oleh Risaatul Lailiyah, pada tahun 2013 yang berjudul “PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (studi di Desa Sidoarjo)”, jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 3, Nomor 1, April 2013. Mengemukakan bahwa Tulisan ini menjelaskan tentang peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Jati, desa Banjar Bendo dan desa Sumpat kecamatan Sidoarjo dalam memberdayakan masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁰

Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang peranan BPD dalam pemberdayaan masyarakat yang mana BPD adalah penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada lembaga yang dia angkat tetapi sama-sama membahas peran aparatur desa yang sama-sama menyalurkan aspirasi masyaakat demi tercapainya demokrasi.

²⁰ Risaatul Lailiyah, “Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (April 1, 2013): 57–76.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²¹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan dilapangan.²² Yang menjadi objek penelitian ini adalah Perangkat Tiyuh dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Tiyuh di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - b. Sifat Penelitian, yaitu penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel Tiyuh Karta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.²³

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam peneltiuan ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung yang dijadikan observasi dengan para pegawai kantor Tiyuh Karta dalam menetapkan Peran Perangkat Tiyuh dalam menggerakkan Kebijakan

²¹ Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2015), 21.

²² *Ibid.*, 10.

²³ M Nazir, *Metode penelitian* (Ghalia Indonesia, 1985), 43.

Kepala Tiyuh dilihat dari Fiqh Siyasah (Studi di Tiyuh Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.²⁴

3. Populasi Dan Sempel Penelitian

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁵ Dalam skripsi ini populasinya adalah jumlah kepala keluarga 1.700 KK. di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sempel

Sempel yang digunakan adalah *Purposive sampling*, penentuan sempel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁶ Adapun sempel yang digunakan terdiri dari: Kepala Tiyuh Karta 1 orang, BPT Tiyuh Karta 1 orang, Staf Tiyuh Karta 3 orang, Warga Masyarakat Tiyuh 5 orang dan jumlah 10 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dikumpulkan dari tahun 2016-2021 sebagai berikut :

²⁴ *Ibid.*, 132.

²⁵ *Ibid.*, 147.

²⁶ *Ibid.*, 155.

a. Metode Observasi

Metode Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat data yang bersumber data Tiyuh Karta serta mengamati faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Peran Perangkat Tiyuh khususnya dalam pembangunan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.²⁷

b. Metode Interview

Metode interview yaitu proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan penelitian ini menggunakan metode interview pedoman wawancara.²⁸

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi penulis melakukan dengan cara mengambil data tentang aktivitas pada perangkat tiyuh dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat di dalam masyarakat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.²⁹

5. Metode Pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

²⁷ B Ashshofa, *Metode penelitian hukum* (Rineka Cipta, 1996), 99.

²⁸ *Ibid.*, 58–59.

²⁹ *Ibid.*, 59.

- a. *Sistematising* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- b. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan keseragaman satuan data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.³⁰

6. Metode Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan se jelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.³¹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang paling penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga pemahaman ini

³⁰ *Ibid.*, 56.

³¹ Nazir, *Metode penelitian*, 34.

akan membantu menjawab pertanyaan baru yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu :

- 1) Bagaimana fenomena peran perangkat tiyuh dalam menggerakkan kebijakan kepala tiyuh di tiyuh karta.
- 2) Bagaimana motif terjadi ketidak sinambungan antara perangkat tiyuh dengan masyarakat dalam masalah demokrasi di tiyuh.

b. Data display/penyajian data

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang lengkap selanjutnya adalah melakukan penyajian data, Penelitian ini kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan kesimpulan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan.

7. Teknik Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dari lapangan yang telah dipisahkan kemudian disusun untuk mencari pola, hubungan dari kecenderungan

hingga sampai pada tahap kesimpulan. Untuk memperkuat kesimpulan dari penulis diperoleh verifikasi ulang untuk menambahkan data baru yang mendukung kesimpulan tersebut sehingga kesimpulan akan menjadi data yang valid. Proses ini dalam bahan bacaan atau literature review dapat membantu peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang valid berkaitan dengan hasil data yang diperoleh dari lapangan dengan triangulasi data.

Triangulasi data dalam pengujian Kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.³²

Penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data teknik dimana peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), sehingga data tersebut bias dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Research and Development* (Alfabeta Bandung, 2014), 40.

I. Sistematika Pembahasan

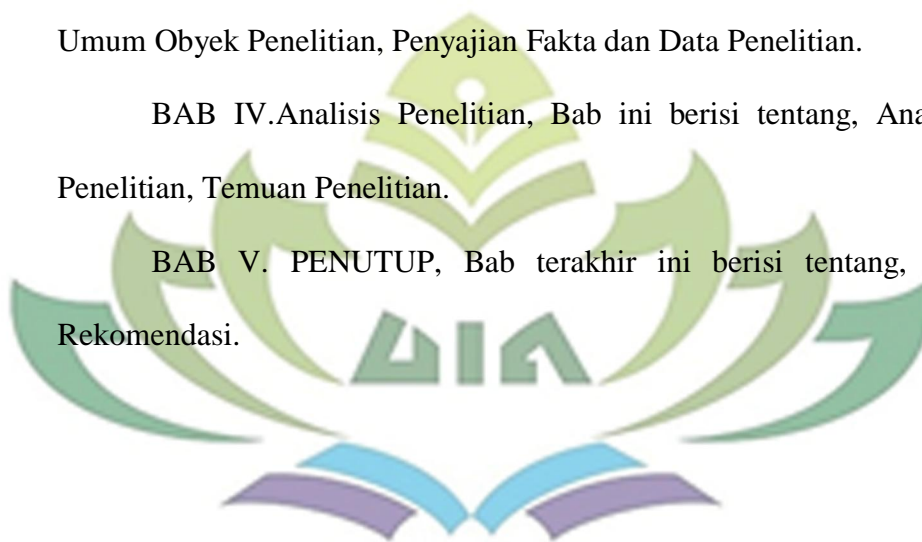
BAB I. PENDAHULUAN, BAB ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Penentuan Informan, Teknik Keabsahan Data, Sistematika Pembahasan.

BAB II. Landasan Teori

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang, Gambaran Umum Obyek Penelitian, Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

BAB IV. Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang, Analisis Data Penelitian, Temuan Penelitian.

BAB V. PENUTUP, Bab terakhir ini berisi tentang, Simpulan, Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan Dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum³³, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁴

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-Imamah al-*

³³ M Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Hidakarya Agung, 1989), 428.

³⁴ Ali AsSalus, *Imamah dan Khilafah dalam tinjauan Syar'i* / Ali As-Salus; *Terjemah*, Asmuni Solikhan Zamakhsyari (Gema Insani press, 1997), 15.

Shugra. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.³⁵

Kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.³⁶

Secara bahasa *Amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah.³⁷

Kata-kata *Amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "*amara*" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *Amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "dari kami ada *Amir* dan dari Tuan-tuan juga ada *Amir*". Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar.³⁸

³⁵ Djazuli, "Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah," 54.

³⁶ Taufik Rahman dan Maman Abdul Jaliel, *Moralitas pemimpin dalam perspektif Al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 21.

³⁷ Al-yassu'i dan Louwis Ma'luf, "Al-munjid fi al-lughah wa al-alam / dar al-mashriq" (2002): 344.

³⁸ Djazuli, "Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah," 59.

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.³⁹ *Sulthan* secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali.

Perhatikan Rasulullah menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah *mafhum* di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala negara dan *malik*. Di Indonesia kata *Sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir*. Kata *Sulthan* diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim.⁴⁰

2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Dalam setiap pemilihan calon pemimpin, masih banyak umat Islam yang menyia-nyiaakan suaranya, sehingga tidak sedikit calon pemimpin Islam yang kalah dalam pertarungan. Padahal mengangkat pemimpin dalam Islam diperintahkan, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadist. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan patut kepada Allah, Rasul dan penguasa mereka. Perintah patut ini wajib dilaksanakan maka wajib pula memilih pemimpin.

Dalam Hadist riwayat Abu Dawud diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda yang artinya : “jika ada tiga orang dalam perjalanan,

³⁹ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 428.

⁴⁰ Djazuli, “Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah,” 60.

hendaklah mereka menjadikan pemimpin salah seorang diantara mereka”. Dalam perjalanan saja diperintahkan agar mengangkat seorang pemimpin, apalagi dalam bermasyarakat dan bernegara, tuntutan perintah mengangkat pemimpin tentunya lebih besar lagi. Karena itu, para sahabat dan tabiⁱⁿ ijma^{ah} (sepakat) atas wajibnya mengangkat pemimpin atau kepala negara. Kenyataan sosial juga menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup harmonis tanpa adanya pemimpin yang sah mengatur pergaulan mereka.

Tentang wajibnya mengangkat kepala negara dari masa kemasa sepakat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Al-Imam Al-Bagdadi berkata : “sesungguhnya mengangkat imam (pemimpin) adalah suatu fardhu yang wajib”. Al-Imam Al-Mawardi berkata : “kepemimpinan dibuat untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. Al-Imam Ibn Hazm berkata : telah sepakat seluruh ulama Sunni, Syi^{ah} dan Murji^{ah}, mayoritas pengikut Mu^{tazilah} dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya. Ibnu Kaldun berkata : “Sesungguhnya mengangkat pemimpin adalah wajib yang diketahui dalam syara^{ah} dengan ijma^{ah} sahabat dan tabiⁱⁿ”. Allah SWT berfirman : Q.S An-Nisa : 144, Al-Maidah : 51 dan 57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

مُشِينًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.”

Sedangkan menurut golongan najdat, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.⁴¹

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut mu‘tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amr al-Futi dan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif dkk., “Fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik islam” (2008): 108.

sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.⁴²

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan *Al-Asham* dan mengatakan bahwa *Al-Asham* adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut Al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.⁴³

Selain dalil ini yang menjadi dalil Al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'adah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata, "dari kami *amir* dan dari kalian *amir*."⁴⁴

Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari

⁴² *Ibid.*, 108–109.

⁴³ Al imam Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi jilid 2 diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 588.

⁴⁴ *Ibid.*, 589.

kaum Quraisy ini”. Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, “pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib”.⁴⁵

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Kewajiban tersebut, menurut al-Rayis bukan kewajiban individual (Wajib *ain*), tetapi kewajiban kolektif (wajib *kifa'i/fardu kifayah*). Karena itu, seluruh umat Islam berdosa bila tidak melakukannya, namun bila ada yang mewakilinya, umat Islam yang lain terlepas dari dosa akibat meninggalkannya. Pendapat senada dianut pula oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.⁴⁶ Ibn Taimiyah menambahkan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana *bertaqarrub* kepada Allah. Sebab *bertaqarrub* kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat

⁴⁵ *Ibid.*, 590.

⁴⁶ Syarif dkk., “Fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik islam,” 111.

saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikan.⁴⁷

Kaum Syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum Sunni, yakni mengangkat pemimpin itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Sunni, yakni wajib mengangkatnya adalah Allah bukan umat atau rakyat. Argumentasinya, masalah pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijtihadiah yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang boleh menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya.⁴⁸

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, atau pembunuhan. Bahkan, dapat pula menyulut dan mengobarkan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi ataupun yang lainnya yang akan merusak segala sendi kehidupan.

Pada saat seperti itulah, naluri manusia mendambakan tampilnya orang-orang tertentu yang akan menjadi juru selamat. Artinya, secara akli

⁴⁷ Ibnu. Taimiyah, "Siyasah syariah : etika politik islam" (1999): 227.

⁴⁸ Syarif dkk., "Fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik islam," 108.

dapat dipastikan kemestian adanya seorang pemimpin. Karena itu, kendatipun wahyu tidak turun menyangkut eksistensi seorang pemimpin, maka berdasarkan rasio manusia sudah pasti dapat menentukan sikapnya sendiri bertalian dengan eksistensi seorang pemimpin itu.⁴⁹

3. Syarat-Syarat Pemimpin Berdasarkan Fiqh Siyasah

Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin dalam Al-Mawardi mengemukakan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa Quraisy.⁵⁰

Lebih lanjut Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu:

- a. *Al-adâlah*.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan hingga mencapai taraf mujtahid.
- c. Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya.
- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- e. Visi pemikirannya baik sehingga dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya.

⁴⁹ *Ibid.*, 111.

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Kairo: Darul Falah, 1973), 5.

g. Nasab dari keturunan Quraisy.⁵¹

Abdul Qadir Audah dalam A. Hasjmy menetapkan syarat khalifah delapan syarat :

- 1) Islam, diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir, berdasarkan QS. Ali Imran : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۚ وَحَدِّثْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.”

- 2) Laki-laki. Seorang wanita menurut tabiatnya tidak cakap memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.
- 3) Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana jabatan khalifah adalah penguasaan atas orang lain.
- 4) Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam sampai bila mungkin mencapai taraf mujtahid. Bahkan dituntut mengetahui hukum internasional, traktat, dan perdagangan internasional, dan lain-lain.
- 5) Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.

⁵¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*.

- 6) Kemampuan dan Kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat dia juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam.
- 7) Sehat Jasmani dan Rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat.
- 8) Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Karena hadits yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka memerintah dengan adil. Ditujukan untuk maksud terbatas, yaitu waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku secara umum.⁵²

4. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah

Kepemimpinan adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.”⁵³

Adapun ciri-ciri pemimpin Islami adalah sebagai berikut :

a. Taat kepada Allah dan Rasulnya

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur‘an telah memberikan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

⁵² A Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Penerbitan Pustaka Nasional, 1970), 164.

⁵³ Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

b. Beriman dan beramal shaleh

c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan hadist)

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

e. Menjalankan amanah⁵⁴

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

f. Memutuskan perkara dengan adil,

g. Mencintai bawahan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang

⁵⁴ *Ibid.*, 264.

sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam *beramal ma'ruf nahi munkar*. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi akhir jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.

5. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyash

a. Dipilih oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.⁵⁵

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan

⁵⁵ Abidin, *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*, 364.

tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.⁵⁶ Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal. Pertama: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. Kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimîn* dari penduduk Bashrah.⁵⁷

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi.

⁵⁶ Al-Hanbali dan Abu Ya'la Muhamad Ibn Al-Husain Al-farra', *Al Ahkam al-sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-fikr, 1994), 7.

⁵⁷ Al-Mawardi dkk., *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 6.

Kelompok yang lain berata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentanginya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”⁵⁸

b. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga *asyura*. Anggota lembaga *syura* yang notaben adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebageian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, 7.

⁵⁹ *Ibid.*, 10.

c. Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “Barangsiapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, „ini adalah pemimpin“ ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”

Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumhur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.⁶⁰

Ketidak loyalan masyarakat kepada masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika di dalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin

⁶⁰ Ibnu Taimiyyah dan Taqiyyuddin Ahmad bin Abdulhalim, *Minhaj al-Sunnah al-nabawiyah* (Kairo: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), 141–142.

berlangsungnya kaidah-kaidah islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶¹

B. Kepemimpinan Tiyuh

Pemerintahan tiyuh/desa di Indonesia saat ini merupakan isu yang kian menghangat. Terlebih dengan disahkannya UU Desa tahun 2014 lalu, maka posisi pemerintahan di aras lokal ini menjadi semakin dinamis. Sistem pemerintahan yang ada tidak hanya diselenggarakan melalui struktur administrasi yang bersifat *top down* sebagaimana relasi kelembagaan antara pemerintahan kelurahan dengan pemerintahan kecamatan, melainkan juga dinamika politik antara elit desa yang dipilih secara langsung oleh warganya dengan perangkat desa yang juga merefleksikan warga desa. Artinya, kontestasi politik tidak saja berkuat pada konflik kepentingan antar lembaga pemerintahan desa, melainkan juga terjadi di antara aktor-aktor yang ada di tingkat desa itu sendiri, baik aktor-aktor formal maupun informal.

UU Desa yang baru disahkan tersebut menjadi tonggak awal sebagai bagian dari visi pembangunan desa di Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan nasional akan bervisi pada desa atau pemerintah lokal. Bahkan lebih jauh, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI (Bappenas, 2015) telah menyatakan bahwa pembangunan akan dilakukan melalui pinggiran. Konsep pembangunan berbasis pinggiran dalam hal ini berarti visi pembangunan nasional akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses langsung terhadap sumber daya pembangunan. Dengan harapan, simpul utama

⁶¹ Fathul Mu'in, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Desa," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (Agustus 1, 2019): 231–247.

pembangunan berbasis pinggiran ini akan mencapai titik kulminasinya pada tingkat perkotaan.

Interaksi antara pemimpin (dalam hal ini lurah dan juga kepala desa) dan juga warga di aras lokal di tingkat desa dan kelurahan dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan program akan sering terjadi. Sehingga, sinergitas antara kepentingan warga desa dengan kebijakan pemerintah desa dapat terwujud. Selain itu, sinergitas antara warga dan pemerintah desa juga penting untuk mengantisipasi menjadikan tiyuh menjadi objek *negaraisasi tiyuh*.⁶²

1. Pengertian Tiyuh

Tiyuh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiyuh dapat di artikan pula sebagai pembagian wilayah administratif pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh ekuivalen dengan sebutan pekon atau desa, yakni pembagian administratif di bawah kecamatan, sesuai dengan Perda Tulang Bawang Barat Nomor

⁶² Cahyo Seftyono dkk., “Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah,” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2016): 60.

15 Tahun 2014 Tentang penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁶³

Menurut H.A.W. Widjaja, tiyuh/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai wewenang mengatur dirinya sendiri atau kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi asli yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan otonomi daerah.

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2014 Barat, *Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014*, 2014.

tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
2. Menjalankan pemerintah tiyuh/desa;
3. Memilih kepala tiyuh/desa;
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
5. Memiliki tanah sendiri;
6. Menggali dan menetapkan sumber- sumber keuangan sendiri;
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
8. Menyelenggarakan Gotong-royong;
9. Menyelenggarakan peradilan Desa;
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.⁶⁴

Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa didasarkan pada asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Namun demikian, dalam melaksanakan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

⁶⁴ Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, dan Suwondo, "Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 4 (2013): 91–100.

menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.⁶⁵

2. Peran dan Tupoksi Perangkat Tiyuh

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang- sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang sisinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang-pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁶⁶

Definisi Peran menurut Seokanto adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.⁶⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati

⁶⁵ Novianto M. Hantoro, "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Kajiann* 18, no. 4 (2013): 25.

⁶⁶ R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), 368.

⁶⁷ Muhammad Asim Asy'ari, "Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 148.

atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :⁶⁸

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 242–243.

dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Perangkat tiyuh sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa.

Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sana dijelaskan, Untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri).

Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan bebeapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan pada tanggal 5 januari 2016. Diantaranya: Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Setelah disahkannya peraturan menteri dalam Negeri tersebut. Maka mekanisme atau macam-macam pengangkatan perangkat desa, itu hanya mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan Nomenklatur Perangkat Desa.

Struktur Perangkat Tiyuh dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Tiyuh, yakni : Sekretaris Tiyuh/Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum.
2. Pelaksana Teknis, yakni : Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan.
3. Pelaksana Kewilayahan, yakni : Kepala Dusun atau sebutan lain.⁶⁹

Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi pada struktur organisasi dan tata kerja pemerintah tiyuh karta sebagai berikut :

a. Sekretaris Tiyuh

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Tiyuh/Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Sekretaris Tiyuh/Desa bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Tiyuh mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat tiyuh/desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

⁶⁹ Undang-Undang, *Peraturan Daerah Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah*, Cetakan Pe. (Tangerang: Transmart, 2017).

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan pengeluaran, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeeluan, verifikasi. administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Tiyuh, Perangkat Tiyuh, BPT, dan Lembaga Pemerintahan Tiyuh lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.⁷⁰

b. Kepala Urusan (Kaur)

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Tiyuh/Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan akspedisi, dan penataan

⁷⁰ Peraturan Menteri Dalam Nomor 84 Tahun 2015 Negeri, *Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa*, 2015.

administrasi perangkat desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Tiyuh, Perangkat Tiyuh, dan Lembaga Pemerintahan Tiyuh lainnya.

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir dat-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

Ayat (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional.

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata kerja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi tiyuh/desa pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan Upaya pelindungan masyarakat, kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah, serta pedataan dan peneglolaan profil tiyuh/desa

- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan, bidang pendidikan kesejahteraan dan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, kaang taruna
- 3) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁷¹

d. Kepala Dusun

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa

Ayat (1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

⁷¹ *Ibid.*

- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁷²

Landasan hukum dari peran Perangkat Tiyuh dalam menggerakkan kebijakan kepala tiyuh dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 49, yang menyebutkan :

- 1) Perangkat Tiyuh sebagaimana yang di maksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Tiyuh/Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Tiyuh/Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kepada kepala Tiyuh/Desa.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ Undang-Undang, *Desa, Kelurahan dan Kecamatan* (Bandung: Fokus Media, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu al-Mukhtâr alâ al-Durri al-Mukhtâr*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Al-Hanbali, dan Abu Ya'la Muhamad Ibn Al-Husain Al-farra'. *Al Ahkam al-sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-fikr, 1994.
- Al-Mawardi, I, I Hikmatiar, K Fath, dan Q Press. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Kairo: Darul Falah, 1973.
- Al-yassu'i, dan Louwis Ma'luf. "Al-munjid fi al-lughah wa al-alam / dar al-mashriq" 2002.
- Ashshofa, B. *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta, 1996.
- AsSalus, Ali. *Imamah dan Khilafah dalam tinjauan Syar'i / Ali As-Salus; Terjemah, Asmuni Solikhan Zamakhsyari*. Gema Insani press, 1997.
- Bakir, R. Suyoto, dan Sigit Suryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2014. *Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014*, 2014.
- Djaenuri, Aries, Siti Aisyah, dan Enceng. *Sistem Pemerintahan Desa*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2016.
- Djazuli, A. "Fiqh siyasah : implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah" 2003.
- Hantoro, Novianto M. "Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Kajiann* 18, no. 4, 2013..
- Hasan, Alwi, dan Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Penerbitan Pustaka Nasional, 1970.
- Maudoodi, S A A. *Hukum dan konstitusi sistem politik Islam*. Penerbit Mizan, 1990.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

- Mu'in, Fathul. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Desa." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 2 (Agustus 1, 2019).
- Mutahhari, M. *Islam Dan Tantangan Zaman*. Pustaka Hidayah, 1996.
- Nasional, Indonesia. Departemen Pendidikan, Pusat Bahasa. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nazir, M. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia, 1985.
- Qurthubi, Al imam. *Tafsir Al Qurthubi jilid 2 diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahman, Taufik, dan Maman Abdul Jaliel. *Moralitas pemimpin dalam perspektif Al-Quran*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rivai, Veithzal, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sjadzali, M. *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Research and Development*. Alfabeta Bandung, 2014.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarif, Muzar Ibnu, Khamami Zada, Ahmad. Ta'yudin, dan Sayed. Mahdi. "Fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik islam" 2008.
- Taimiyah, Ibnu. "Siyasah syariah : etika politik islam" 1999.
- Taimiyyah, Ibnu, dan Taqiyyuddin Ahmad bin Abdulhalim. *Minhaj al-Sunnah al-nabawiyyah*. Kairo: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986.
- Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*. Hidakarya Agung, 1989.

Jurnal

Asy'ari, Muhammad Asim. "Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor." *Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2017).

Lailiyah, Risaatul. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, no. 1 (April 1, 2013).

Paramitha, Linda Muchacha, Tjahjanulin Domai, dan Suwondo. "Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa." *Jurnal Administrasi Publik* 1, No. 4 (2013).

Puspita, Nabila. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)" (Desember 7, 2018).

Sakban, dan Yan Patmawi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Seftyono, Cahyo, Nugraheni Arumsari, Erisandi Arditama, dan Muhammad Lutfi. "Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2016).

Undang-Undang

Undang-Undang. *Desa, Kelurahan dan Kecamatan*. Bandung: Fokus Media, 2014.

———. *Peraturan Daerah Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah*. Cetakan Pe. Tangerang: Transmart, 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. *Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa*, 2015.

Wawancara

Asan, Ali. Tokoh Adat Tiyuh Karta "Wawancara tentang Sejarah Tiyuh Karta, 15 November 2020".

———. Tokoh Adat Tiyuh Karta "Wawancara Tokoh Adat Tiyuh Karta," 15 November 2020.

Daniel, Wan. Operator Tiyuh "Wawancara Tentang Tanggapan Warga Terhadap Peran Ketua RW Tiyuh Karta," 15 November 2020.

Irawan, Bambang. Kasi Pemerintahan "Wawancara Kasi Pemerintahan Tiyuh

Karta,” 15 November 2020.

———. Kasi Pemerintahan “Wawancara Tentang Keadaan Demografis Tiyuh Karta,” 15 November 2020.

———. Kasi Pemerintahan “Wawancara tentang Letak Geografis Tiyuh Karta,” 15 November 2020.

———. Kasi Pemerintahan “Wawancara Tentang Mata Pencarian Masyarakat Tiyuh Karta,” 15 November 2020.

———. Kasi Pemerintahan “Wawancara tentang Sejarah Tiyuh Karta,” 15 November 2020.

———. Kasi Pemerintahan “Wawancara Tentang Sistem Pendidikan di Tiyuh Karta,” 15 November 2020.

Kamsun. Sekretaris Tiyuh Karta “Wawancara Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Tiyuh,” 15 November 2020.

Sudiyaman. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Kedudukan dan Peran Perangkat Tiyuh,” 15 November 2020.

———. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Kendala Dalam Melaksanakan Program Tiyuh Karta,” 15 November 2020.

———. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Program-Program Pembangunan Tiyuh Karta” 15 November 2020.

———. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Program Tiyuh Karta Yang Belum Terlaksana” 15 November 2020.

———. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Sistem Pemerintahan Tiyuh Karta” 15 November 2020.

———. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Sistem Pendidikan di Tiyuh Karta” 15 November 2020.

———. Kepala Tiyuh “Wawancara Tentang Visi Misi Tiyuh Karta” 15 November 2020.

Surdin. Warga Tiyuh Karta “Wawancara Tentang Tanggapan Warga Terhadap Peran Ketua RW Tiyuh Karta” 15 November 2020.

Tarmin. Ketua RW 7 “Wawancara Tentang Peran Ketua RW Dalam Mendukung Program Tiyuh Karta,” 15 November 2020.